

## PENGARUH PENDIDIKAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KESEJAHTRAAN DAN PENGANGGURAN TERBUKA DI WILAYAH NON SARBAGITA PROVINSI BALI

Widi Srinarayana<sup>1</sup>

I Ketut Sutrisna<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

<sup>1</sup>email: [wsrinarayana@gmail.com](mailto:wsrinarayana@gmail.com)

### ABSTRAK

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Permasalahan strategis di pemerintah Provinsi Bali tidak jauh beda dengan di pemerintah pusat, yakni bagaimana upaya menurunkan angka pengangguran. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis pengaruh pendidikan dan PAD secara langsung terhadap IPM di wilayah non SARBAGITA Provinsi Bali; 2) untuk menganalisis pengaruh pendidikan, PAD, dan IPM secara langsung terhadap tingkat pengangguran terbuka di wilayah non SARBAGITA; 3) untuk mengetahui peran IPM dalam memediasi pengaruh pendidikan dan PAD terhadap tingkat pengangguran terbuka di wilayah non SARBAGITA. Teknik analisis yang digunakan adalah *path analysis*. Hasil dari penelitian ini yaitu : 1) pendidikan dan PAD berpengaruh positif terhadap IPM di wilayah non SARBAGITA Provinsi Bali; 2) pendidikan berpengaruh negatif, PAD tidak berpengaruh dan IPM berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di wilayah non SARBAGITA Provinsi Bali; dan 3) IPM memediasi pengaruh pendidikan dan PAD terhadap tingkat pengangguran terbuka di wilayah non SARBAGITA Provinsi Bali.

**Kata Kunci :** Pendidikan, PAD, IPM, Tingkat Pengangguran

### ABSTRACT

*Unemployment is a condition in which a person belonging to the labor force wants to get a job but has not been able to get it. The strategic problem in the Bali provincial government is not much different from the central government, such as how to reduce risk. The objectives to be achieved in this research are: (1) to analyze the direct influence of education and PAD on HDI in non-SARBAGITA areas, Bali Province; 2) to analyze the direct influence of education, PAD, and HDI on related parties in non-SARBAGITA areas; 3) to determine the role of HDI in mediating the influence of education and PAD on open elements in non-SARBAGITA areas. The analytical technique used is path analysis. The results of this study are: 1) education and PAD have a positive effect on HDI in non-SARBAGITA areas, Bali Province; 2) education has a negative effect, PAD does not have a positive effect and PAD does not have a positive effect on the open environment in non-SARBAGITA areas, Bali Province; and 3) mediating the impact of HDI and PAD on the level of environmental awareness in non-SARBAGITA areas, Bali Province.*

**Keywords:** Education, PAD, IPM, Unemployment Rate

## **PENDAHULUAN**

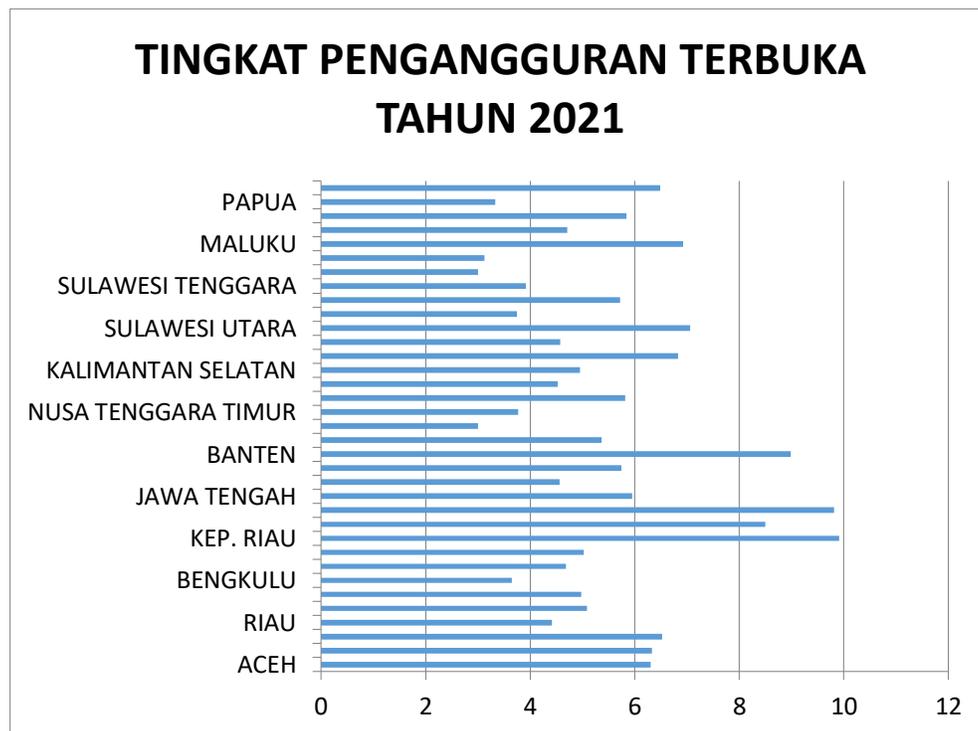
Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena memengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami. Pengangguran sering kali menjadi salah satu permasalahan negara-negara berkembang, disatu sisi jumlah penduduk dari tahun ketahun terus bertambah, disisi lain peningkatan kemampuan ekonomi, baik pemerintah maupun swasta tidak secepat peningkatan jumlah penduduk. Terjadinya ketimpangan antara laju permintaan lapangan kerja dengan laju penawaran lapangan kerja mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (BPS, 2007).

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Hanya ada dua hal yang dibahas mengenai ketenagakerjaan, yaitu sebagian diperkerjakan secara penuh dan sebagian sepenuhnya menganggur. Pengangguran dapat didefinisikan sebagai orang yang termasuk dalam angkatan kerja dan aktif untuk memperoleh suatu pekerjaan pada tingkat upah tertentu, atau tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai (Sukirno, 2008). Pengangguran mengurangi pendapatan pajak pemerintah maka memperlambat pembangunan ekonomi. Pengangguran menyebabkan hilangnya mata pencaharian dan pendapatan masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia ada sebanyak 9,1 juta orang per Agustus 2021. Jumlah itu turun sekitar 670.000 orang dari posisi per Agustus 2020 yang mencapai 9,77 juta orang. Penurunan tersebut sejalan dengan

tingkat pengangguran terbuka secara nasional yang turun dari 7,07 persen di Agustus 2020 menjadi sebesar 6,49 persen per Agustus 2021. Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Angka pengangguran pada Agustus 2021 lebih rendah kalau dibandingkan dengan Agustus 2020. Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan menjadi 6,49 persen atau setara 9,1 juta orang dari sebelumnya 7,07 persen atau setara 9,77 juta orang, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2021 yang sebesar 6,49 persen. Artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang pengangguran.

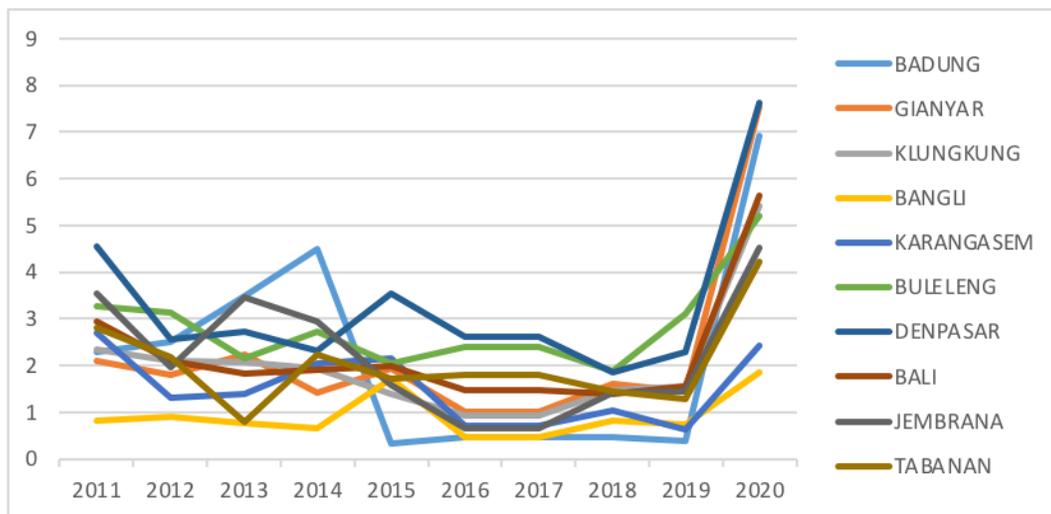
**Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2021**



Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2021)*

Lapangan kerja yang tidak mencukupi kerap disebut sebagai salah satu penyumbang utama jumlah pengangguran yang tinggi. Kendati demikian, Bali mungkin bisa menjadi

contoh yang mengagumkan bagi provinsi lain di tanah air. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Agustus 2021, Provinsi Bali menjadi provinsi dengan angka pengangguran terendah, yaitu 5,37 persen. Angka pengangguran di Bali terendah, yaitu 5,37 persen. Hampir tidak ada yang menganggur di Bali, untuk menekan angka pengangguran harus tersedia jumlah lapangan pekerjaan yang cukup dan bersifat permanen. Lapangan pekerjaan tersebut juga harus didukung oleh investasi, dan kegiatan ekspor. Untuk Bali, perhotelan sebagai bagian dari industri pariwisata menjadi salah satu lapangan kerja yang paling banyak. Meski begitu, sektor lainnya juga tetap dijaga. Sektor informal memang menjamur di Bali. Jumlahnya mencapai sekitar 8,5 persen dari total masyarakat Bali. Mulai dari kerajinan patung, perak, bambu, busana, anyaman, dan lainnya banyak ditemukan di Pulau Dewata. Bidang fesyen, menjadi salah satu produk yang paling banyak dihasilkan oleh masyarakat Bali. Ketersediaan lapangan pekerjaan saja sebetulnya tidak cukup untuk menekan angka pengangguran di suatu daerah, tanpa diiringi dengan semangat dari masyarakat itu sendiri. Termasuk dalam menjalankan industri kecil dan menengah.



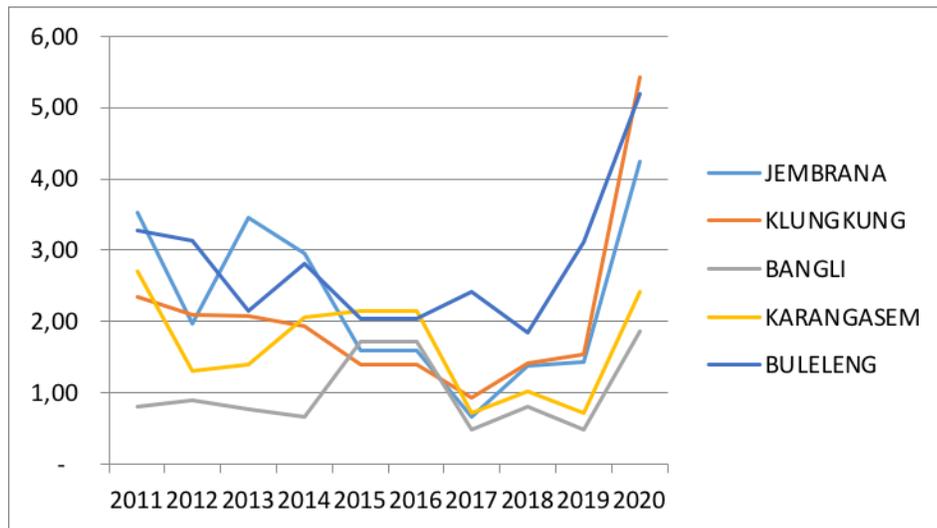
Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2021)*

**Gambar 1. Grafik Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2011-2020**

Grafik 1 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode 2011 sampai 2020 pada wilayah SARBAGITA, jumlah pengangguran di Kabupaten Badung meningkat 6,92 persen selama 2020 dibandingkan posisi tahun sebelumnya (*year on year/YoY*). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, realisasi tersebut menjadikan Badung sebagai daerah nomor dua di Bali dengan pengangguran terbesar. Posisi pertama diduduki Denpasar dengan jumlah pengangguran yang naik 7,62 persen (YoY). Perlu diketahui, Denpasar dalam tren selama tiga tahun ke belakang memang menjadi daerah dengan jumlah pengangguran terbesar di Bali. Kondisi sebaliknya terjadi pada Badung yang sebelumnya pada 2019 menempati urutan nomor dua pengangguran terendah dari sembilan daerah di Bali. Pengangguran terendah di Bali pada 2019 diduduki oleh Bangli dengan jumlah 1.104 orang. Sebelumnya pada 2018, Badung menjadi daerah dengan jumlah pengangguran nomor tiga terendah di Bali dengan jumlah 1.670 orang. Bangli tetap menjadi daerah dengan pengangguran terendah nomor satu di Bali pada 2018 yakni sejumlah 1.217 orang, kemudian disusul Klungkung sebanyak 1.596 orang.

Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Tri Arya Dhyana mengatakan peningkatan jumlah pengangguran di Badung tersebut berkaitan dengan adanya pandemi Covid-19. Peningkatan jumlah pengangguran di Badung ikut menyumbang realisasi pengangguran di Bali selama 2020 yang tercatat meningkat 6,92 persen (YoY) menjadi 144.500 orang. Denpasar menyumbang jumlah pengangguran 7,62 persen untuk Bali, Badung 6,92 persen, dan Gianyar 7,53 persen. Bangli tetap menjadi daerah dengan pengangguran terendah di Bali dengan jumlah 2.727 orang atau naik 1,86

persen (YoY) pada 2020. Peningkatan jumlah pengangguran di Bangli pada 2020 terhitung tinggi jika dibandingkan realisasi 2019 yang terpantau bisa menekan jumlah pengangguran hingga 0,48 persen (YoY). Sebelumnya, pekerja yang dirumahkan karena sektor usaha terdampak pandemi Covid-19 diproyeksi berpotensi meningkat signifikan pada tahun ini seiring dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Bangli tetap menjadi daerah dengan pengangguran terendah di Bali dengan jumlah 2.727 orang atau naik 1,86 persen (YoY) pada 2020. Peningkatan jumlah pengangguran di Bangli pada 2020 terhitung tinggi jika dibandingkan realisasi 2019 yang terpantau bisa menekan jumlah pengangguran hingga 0,48 persen (YoY). Sebelumnya, pekerja yang dirumahkan karena sektor usaha terdampak pandemi Covid-19 diproyeksi berpotensi meningkat signifikan pada tahun ini seiring dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Badung tercatat menjadi kabupaten dengan pekerja dirumahkan dan PHK tertinggi yakni masing-masing sebanyak 42.409 pekerja dan 1.551 pekerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Ida Bagus Ardha mengatakan jumlah pekerja yang dirumahkan bisa saja lebih tinggi lagi. Pemerintah sudah mengimbau perusahaan untuk tidak buru-buru melakukan PHK kepada pekerja karena perekonomian yang saat ini terdampak pandemi Covid-19. Apabila penanganan pandemi Covid-19 bisa diatasi, perekonomian akan mampu bertumbuh lagi sehingga akan berdampak pada ketenagakerjaan. Hanya saja, di tengah kondisi pekerja yang dirumahkan dan PHK meningkat, jumlah pengangguran terbuka di Bali pun semakin lebar. Pada 2019, pengangguran terbuka di Bali mencapai 1,57 persen dari angkatan kerja. Per 2020, jumlahnya naik menjadi 5,63 persen.



Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2021)*

**Gambar 2. Grafik Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Wilayah non SARBAGITA Provinsi Bali 2011-2020**

Grafik 2 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode 2011 sampai 2020 pada wilayah non SARBAGITA, Kabupaten Jembrana memiliki tingkat pengangguran tertinggi yaitu pada tahun 2011. TPT Kabupaten Jembrana tahun 2011 sebanyak 3,53 persen dan sampai tahun 2018 turun menjadi 1,38 persen. TPT terendah dimiliki oleh Kabupaten Bangli yaitu pada tahun 2011 TPT Kabupaten Bangli sebesar 0,81 persen dan sampai tahun 2018 TPT Kabupaten Bangli sebesar 0,8 persen.

Penurunan pengangguran pada wilayah non SARBAGITA Provinsi Bali yang cukup tajam, khususnya dari tahun 2011 sampai 2020 yang ditunjukkan pada grafik 1.1.2 tidak selalu dapat dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada wilayah non SARBAGITA Provinsi Bali. Pada data penduduk yang tidak menganggur, terdapat

penduduk yang disebut angkatan kerja setengah menganggur, yaitu angkatan kerja yang bekerja kurang dari 35 jam sehari. Penduduk dalam kelompok ini jelas tidak dapat dimasukkan sebagai pengangguran, tetapi penghasilan yang diterima pun tidak akan cukup untuk memenuhi standar hidup sejahtera.

Permasalahan strategis di pemerintah Provinsi Bali tidak jauh beda dengan di pemerintah pusat, yakni bagaimana upaya menurunkan angka pengangguran. Mengingat banyaknya jumlah angkatan kerja yang muncul disetiap tahunnya membuat persaingan mencari pekerjaan semakin sulit. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya pengangguran. Pengangguran diakibatkan oleh kualitas SDM yang rendah, sehingga tersisih pada kompetisi pasar yang modern saat ini. Kualitas SDM dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan konsep yang mendasari pembangunan untuk mencapai kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan. Upaya untuk menyejahterakan masyarakat didalam pembangunan manusia ada tiga komponen dasar. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan hidup layak (*living standards*). Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), serta tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian pembangunan manusia yang diukur dengan IPM wilayah non SARBAGITA selama kurun waktu delapan tahun terakhir terus

menunjukkan peningkatan. IPM sebagai indikator pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Buleleng menunjukkan nilai yang tertinggi di wilayah non SARBAGITA. Pada tahun 2018 IPM Kabupaten Buleleng sebesar 67,73 persen dan terus meningkat setiap tahunnya sampai pada tahun 2018 menjadi sebesar 71,7 persen.

Capaian IPM di tahun 2018 ini menempatkan posisi Kabupaten Buleleng sebagai yang tertinggi di wilayah non SARBAGITA, diikuti dengan Kabupaten Jembrana posisi kedua sebesar 71,65 persen, Kabupaten Klungkung 70,9 persen, Kabupaten Bangli 68,96 persen dan terakhir Kabupaten Karangasem 66,49 persen. Namun angka IPM wilayah non SARBAGITA ini masih dibawah rata-rata IPM Provinsi Bali tahun 2018 sebesar 74,77 persen. Untuk Kabupaten non SARBAGITA lainnya angka IPM berada di angka 64 persen sampai dengan 70 persen. Angka ini masih jauh berada dibawah wilayah SARBAGITA yang rata-rata IPMnya sebesar 72 persen sampai 83 persen (BPS Provinsi Bali, 2018).

Rendahnya IPM dapat berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Rendahnya produktivitas tenaga kerja dapat berdampak terhadap kinerja serta kepercayaan para pengusaha dan investor untuk menggunakan jasa tenaga kerja di Bali. Oleh karena itu, produktivitas tenaga kerja sangat menentukan kondisi permintaan tenaga kerja itu sendiri. Sehingga produktivitas yang rendah akan membuat perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan para tenaga kerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini tentunya akan meningkatkan jumlah pengangguran. Nenny (2017) dalam penelitiannya menjelaskan IPM mampu mengurangi tingkat pengangguran di Manado.

Menurut Purnastuti, *et al.*, (2013), investasi dalam pendidikan disebabkan karena pekerjaan mengharuskan tenaga kerja memiliki pendidikan yang tinggi, oleh karena itu terjadi ekspansi besar-besaran di sektor pendidikan di Indonesia. Pendidikan diposisikan

sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada dan mencerminkan tingkat kepandaian atau pencapaian pendidikan formal dari penduduk karena semakin tingginya tamatan pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan kerja atau produktivitas seseorang dalam bekerja. Keberadaan fasilitas pendidikan yang murah akan sangat membantu meningkatkan produktivitas (Asmita dkk., 2017). Tujuan akhir program pendidikan adalah teraihnya lapangan kerja yang diharapkan. Maulana (2013) menjelaskan bahwa pendidikan mampu meningkatkan angka IPM di Indonesia.

Made Mangku Pastika menyoroti sistem pendidikan saat ini yang dirasakan masih mencerminkan ketidakadilan. Banyak anak-anak yang miskin tidak masuk dalam sekolah negeri. Justru sekolah negeri yang notabene mendapat subsidi dan dibiayai oleh pemerintah justru menerima anak-anak yang NEM-nya tinggi yang sering kali adalah anak orang yang mampu, yang fasilitas belajarnya lengkap, dan mampu les privat. Sedangkan anak-anak miskin yang memang tidak memiliki sarana belajar yang memadai, harus bekerja membantu orang tuanya sehingga NEM-nya rendah, harus masuk di sekolah swasta yang justru harus membayar mahal (Bulletin Dewata, 2018). Faktor ekonomi berada di urutan pertama penyebab putus sekolah, kemudian pemahaman orang tua terkait pentingnya pendidikan masih rendah sehingga anak usia sekolah harus bekerja, dan faktor geografis membuat susah akses ke sekolah (NusaBali, 2018).

Pendidikan mencerminkan tingkat kepandaian atau pencapaian pendidikan formal dari penduduk karena semakin tingginya tamatan pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan kerja atau produktivitas seseorang dalam bekerja. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui tamatan pendidikan diharapkan dapat

mengurangi jumlah pengangguran, dengan asumsi tersedianya lapangan pekerjaan formal. Pada umumnya untuk bekerja dibidang perkotaan atau pekerjaan yang bergengsi membutuhkan orang-orang atau tenaga kerja berkualitas, profesional dan sehat agar mampu melaksanakan tugas-tugas secara efektif dan efisien.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka peluangnya untuk melamar pekerjaan di suatu lapangan usaha semakin besar. Hal ini disebabkan tuntutan perusahaan yang menginginkan tenaga kerja dengan kualitas yang tinggi. Anggun (2013) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pendidikan yang dimiliki masyarakat mampu mengurangi jumlah pengangguran di Sumatra Barat. Dalam jangka panjang tujuan dari pendidikan diarahkan kepada kegiatan yang menghasilkan tenaga-tenaga kerja terdidik yang merupakan investasi keahlian dan keterampilan didalam pembangunan (Helen, 2008).

Strategi pembangunan harus mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan. Namun, kenyataannya pembangunan nasional secara menyeluruh tidak dapat dilakukan hanya dengan pengelolaan kewenangan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, berkaitan dengan pemerataan pembangunan nasional, khususnya dalam hal meningkatkan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sumber-sumber keuangan utama daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Adanya ketimpangan PAD antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain di

Provinsi Bali, maka melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat sumber lainnya yang dapat digunakan dalam pembangunan daerah yaitu dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta lain-lain pendapatan yang sah.

Dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menciptakan pendapatan daerahnya serta melakukan alokasi untuk prioritas pembangunan di daerahnya secara mandiri dan diharapkan dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan potensi dan aspirasi lokal untuk mengembangkan wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat diharapkan juga turut berperan menjadi subjek pembangunan, bukan hanya menjadi objek pembangunan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan suatu daerah dan juga kemajuan nasional. Spesifiknya, pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan belanja daerah melalui pengeluaran pembangunan di sektor-sektor pendukung untuk meningkatkan IPM. Setyowati dan Suparwati (2012) serta Sarkoro dan Zulfikar (2016) sama-sama melakukan penelitian pengaruh PAD terhadap indeks pembangunan manusia mendapatkan hasil bahwa PAD berpengaruh positif terhadap IPM.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Rancangan penelitian kuantitatif disebut sebagai penelitian yang menggunakan paradigma *positivism*, yaitu dari teori-teori dan temuan orang lain kemudian disusun hipotesis sesuai masalah penelitian yang akan dipecahkan (Sugiyono, 2014:13). Hipotesis tersebut kemudian diuji melalui data yang telah

dikumpulkan dalam penelitian ini. Penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014:55). Dalam penelitian ini, penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu pengujian variabel pendidikan dan PAD terhadap tingkat pengangguran terbuka di wilayah non SARBAGITA Provinsi Bali melalui IPM. Penelitian ini dilakukan di wilayah non SARBAGITA (Jembrana, Klungkung, Bangli, Karangasem dan Buleleng). Alasan memilih wilayah ini, dikarenakan berdasarkan data yang diperoleh wilayah ini memiliki pendidikan, PAD, dan IPM yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi non perilaku. Observasi non perilaku yaitu peneliti hanya sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dalam pengamatan (Sugiyono, 2014:203). Metode observasi non perilaku merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mengamati, mencatat, dan mempelajari uraian-uraian dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan peneliti tidak terlibat langsung (Sugiyono, 2014:203). Observasi ini dilakukan dengan memperoleh data sekunder dari instansi-instansi terkait, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali serta dengan cara mengamati, mencatat, dan mempelajari uraian dari buku-buku, karya ilmiah seperti skripsi, artikel, dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan untuk pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan bantuan program *Eviews 10*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis jalur (*path analysis*).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian, seperti nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif dalam penelitian dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif Pendidikan, PAD, IPM dan Tingkat Pengangguran**

	<i>Descriptive Statistics</i>				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendidikan	50	4.60	8.23	6.7712	.83252
PAD	50	22961237	455195426	158356942.38	95559232.996
IPM	50	62.00	72.55	68.2320	2.68260
Tingkat Pengangguran	50	.48	5.42	1.9650	1.11201
Valid N (listwise)	50				

Sumber: *Lampiran 2 (Data Diolah), 2021*

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat informasi mengenai nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai mean dari masing-masing variabel. Untuk variabel pendidikan memiliki nilai minimum 4,60 tahun dengan nilai maksimum 8,23 tahun dan rata-rata 6,97712 tahun dengan standar deviasi yaitu 0,83252 tahun. Untuk variabel PAD memiliki nilai minimum Rp 22.961.237,- dengan nilai maksimum Rp 455.195.426,- serta rata-rata Rp 158.356.942,38 dan standar deviasi sebesar Rp 95.559.232,996,-. Pada variabel IPM, memiliki nilai minimum 62,00 persen dengan nilai maksimum 72,55 persen dan nilai rata-rata sebesar 68,2320 persen serta standar deviasi sebesar 2,68260 persen. Untuk variabel tingkat pengangguran memiliki nilai minimum sebesar 0,48 persen dengan nilai maksimum sebesar 5,42 persen dan nilai rata-rata sebesar 1,9650 persen serta standar deviasi sebesar 1,11201 persen.

Terdapat tiga macam pendekatan estimasi yang digunakan untuk regresi data panel yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, Dan *Random Effect Model*. Menentukan mana model terbaik dengan cara melakukan uji *Chow* dan uji *Hausman*. Hasil pengolahan menggunakan *Common Effect Model* untuk persamaan 1 dan persamaan 2 ditunjukkan pada Tabel 3 hasil regresi data panel *Common Effect Model* (CEM) persamaan 1 dan Tabel 4 hasil regresi data panel *Common Effect Model* (CEM) persamaan 2.

**Tabel 3. Hasil Regresi Data Panel *Common Effect Model* (CEM) Persamaan 1**

Variabel	Koefisien	t-statistik	Signifikansi
C	24.5380	16.4580	0.0000
LN_pendidikan	19.0518	27.5359	0.0000
LN_PAD	1.5318	11.2720	0.0000
<i>R-Squared</i>		0.9488	
F-Statistik		435.8700	
Signifikansi (F-Statistik)		0.0000	

**Tabel 4. Hasil Regresi Data Panel *Common Effect Model* (CEM) Persamaan 2**

Variabel	Koefisien	t-statistik	Signifikansi
C	-13.4105	-2.0202	0.0492
IPM	0.4146	1.6600	0.1037
LN_pendidikan	-6.1013	-1.2444	0.2196
LN_PAD	-0.2697	-0.6023	0.5499
<i>R-Squared</i>		0.1389	
F-Statistik		2.4723	
Signifikansi (F-Statistik)		0.0735	

Hasil pengolahan menggunakan *Fixed Effect Model* untuk persamaan 1 dan persamaan 2 ditunjukkan pada Tabel 5 hasil regresi data panel *Fixed Effect Model* (FEM) persamaan 1 dan Tabel 6 hasil regresi data panel *Fixed Effect Model* (FEM) persamaan 2.

**Tabel 5. Hasil Regresi Data Panel *Fixed Effect Model* (FEM) Persamaan 1**

Variabel	Koefisien	t-statistik	Signifikansi
C	27.7199	12.7347	0.0000

LN_pendidikan	18.2409	12.3281	0.0000
LN_PAD	1.1959	5.7576	0.0000
<i>R-Squared</i>		0.9749	
F-Statistik		278.8694	
Signifikansi (F-Statistik)		0.0000	

**Tabel 6. Hasil Regresi Data Panel *Fixed Effect Model* (FEM) Persamaan 2**

Variabel	Koefisien	t-statistik	Signifikansi
C	2.9656	0.2818	0.7795
IPM	-0.0656	-0.1943	0.8469
LN_pendidikan	1.8582	0.2665	0.7912
LN_PAD	-0.0125	-0.0205	0.9838
<i>R-Squared</i>		0.2967	
F-Statistik		2.5312	
Signifikansi (F-Statistik)		0.0288	

Hasil pengolahan menggunakan *Random Effect Model* untuk persamaan 1 dan persamaan 2 ditunjukkan pada Tabel 7 hasil regresi data panel *Random Effect Model* (REM) persamaan 1 dan Tabel 8 hasil regresi data panel *Random Effect Model* (REM) persamaan 2.

**Tabel 7. Hasil Regresi Data Panel *Random Effect Model* (REM) Persamaan 1**

Variabel	Koefisien	t-statistik	Signifikansi
C	27.2295	16.9282	0.0000
LN_pendidikan	18.2974	19.0625	0.0000
LN_PAD	1.2744	8.4976	0.0000
<i>R-Squared</i>		0.9391	
F-Statistik		362.0724	
Signifikansi (F-Statistik)		0.0000	

**Tabel 8. Hasil Regresi Data Panel *Random Effect Model* (REM) Persamaan 2**

Variabel	Koefisien	t-statistik	Signifikansi
C	-13.4105	-2.1361	0.0380
IPM	0.4146	1.7552	0.0286
LN_pendidikan	-6.1013	-1.3158	0.0477

LN_PAD	-0.2697	-0.6368	0.0527
<i>R-Squared</i>		0.3389	
F-Statistik		2.4723	
Signifikansi (F-Statistik)		0.0335	

Hasil pengolahan uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier* untuk persamaan 1 dan persamaan 2 ditunjukkan pada tabel 9 hasil uji *Chow*, *Hausman*, dan *LM test* persamaan 1 dan tabel 10 hasil uji *Chow*, *Hausman*, dan *LM test* persamaan 2. Tabel 4.1 Hasil Uji *Chow*, *Hausman*, dan *LM Test* Persamaan 1

**Tabel 9. Hasil Uji *Chow*, *Hausman*, dan *LM Test* Persamaan 1**

Uji	<i>Effect test</i>	Signifikan si	Keputus an	Model terbaik	Kesimpul an
<i>Chow</i>	<i>Cross-Section F</i>	0.0000	Tolak Ho	FEM	Model terbaik adalah
	<i>Cross-Section Chi-Square</i>	0.0000			
<i>Hausman</i>	<i>Cross-Section random</i>	0.0481	Tolak Ho	FEM	<i>Fixed Effect Model (FEM)</i>
<i>Lagrange Multiplier</i>	<i>Breunch-pagan</i>	0.0000	Tolak Ho	CEM	

**Tabel 10. Hasil Uji *Chow*, *Hausman*, dan *LM test* Persamaan 2**

Uji	<i>Effect test</i>	Signifika nsi	Keputusan	Model terbaik	Kesimpul an
<i>Chow</i>	<i>Cross-Section F</i>	0.0690	Gagal Tolak Ho	CEM	Model terbaik adalah
	<i>Cross-Section Chi-Square</i>	0.0384			
<i>Hausman</i>	<i>Cross-Section random</i>	0.06000	Gagal Tolak Ho	REM	<i>Random Effect Model (REM)</i>
<i>Lagrange Multiplier</i>	<i>Breunch-pagan</i>	0.8678	Gagal Tolak Ho	REM	

Berdasarkan hasil uji yang ditunjukkan pada tabel 9 dan tabel 10 maka disimpulkan bahwa model terbaik untuk persamaan 1 adalah *Fixed Effect Model* (FEM) sehingga untuk pengujian analisis jalur serta pengujian hipotesis persamaan 1 akan menggunakan FEM

dan model terbaik untuk persamaan 2 adalah *Random Effect Model* (REM) sehingga untuk pengujian analisis jalur serta pengujian hipotesis persamaan 2 akan menggunakan REM.

Penelitian ini menggunakan korelasi untuk menguji ada tidaknya gejala multikolinearitas pada model. Dasar keputusan uji multikolinearitas dengan cara korelasi adalah model dikatakan tidak terjangkau masalah multikolinearitas jika tidak terdapat korelasi yang lebih dari 0,80 atau kurang dari -0,80. Hasil pengujian korelasi pada persamaan 1 dan persamaan 2 ditunjukkan oleh tabel 11 hasil pengujian korelasi persamaan 1 dan tabel 12 hasil pengujian korelasi persamaan 2.

**Tabel 11. Hasil Pengujian Korelasi Persamaan 1**

	LN_PAD	LN_PENDIDIKAN
LN_PAD		-0.022531
LN_PENDIDIKAN	-0.022531	

**Tabel 12. Hasil Pengujian Korelasi Persamaan 2**

	IPM	LN_PENDIDIKAN	LN_PAD
IPM		0.600304	0.351502
LN_PENDIDIKAN	0.600304		-0.022531
LN_PAD	0.351502	-0.022531	

Berdasarkan tabel 11 dan tabel 12 terlihat bahwa tidak ada korelasi yang lebih dari 0,80 atau kurang dari -0,80 sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan 1 dan persamaan 2 tidak terjangkau masalah multikolinearitas.

Pengujian persamaan 1 dilakukan untuk melihat pengaruh pendidikan dan PAD terhadap IPM secara langsung yang dilakukan dengan program *Eviews 10* maka hasil persamaan regresi disajikan sebagai berikut.

$$\hat{Y}_1 = 27,71988 + 18,24094 \text{ LN\_X}_1 + 1,195900 \text{ LN\_X}_2 \dots\dots\dots(3)$$

Persamaan 1 menunjukkan bahwa variabel pendidikan dengan nilai *Coefficients* sebesar 18.24094 dan nilai signifikansi  $0.000 < 0,05$  menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Variabel PAD dengan nilai *coefficients Beta* sebesar 1,95900 dan nilai signifikansi  $0.000 < 0,05$  menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Pengujian persamaan 2 dilakukan untuk melihat pengaruh pendidikan, PAD dan IPM terhadap tingkat pengangguran secara langsung yang dilakukan dengan menggunakan program *Eviews 10* maka hasil persamaan regresi disajikan sebagai berikut.

$$\hat{Y}_2 = -13,41046 - 6,101324LN\_X_1 - 0,269663LN\_X_2 + 0,414550 Y_1 \dots\dots\dots(4)$$

Persamaan 2 menunjukkan bahwa variabel pendidikan dengan nilai *coefficients beta* sebesar -6,101324 dan nilai signifikansi  $0.0477 < 0,05$  menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Variabel PAD dengan nilai beta sebesar -0,269663 dan nilai signifikansi  $0.5274 > 0,05$  menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. IPM dengan nilai *coefficients beta* sebesar 0,41455 dan nilai signifikansi  $0.0285 < 0,05$  menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Berdasarkan persamaan 1 dan persamaan 2 maka dapat dilihat dan dibuat ringkasan koefisien jalur dan signifikansi hubungan antar variabel seperti yang disajikan dalam tabel 13 sebagai berikut

**Tabel 13. Ringkasan Koefisien Jalur dan Signifikansi Hubungan Antar Variabel**

Regresi	<i>Coefficients</i>	<i>Probability</i>	Keterangan
---------	---------------------	--------------------	------------

X1→ Y1	18,240904	0,0000	Positif signifikan
X2→ Y1	1,195900	0,0000	Positif Signifikan
X1→ Y2	-6,101324	0,0477	Negatif Signifikan
X2→ Y2	-0,269663	0,5274	Negatif, tidak signifikan
Y1→ Y2	0,41455	0,0283	Positif, signifikan

Mengetahui nilai  $e_1$  yang menunjukkan jumlah variance variabel IPM yang tidak dijelaskan oleh pengaruh pendidikan dan PAD dihitung dengan menggunakan rumus:

$$e_1 = \sqrt{1 - R_1^2}$$

$$e_1 = \sqrt{1 - 0,943} = 0,2387$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai  $e_2$  yang menunjukkan *variance* variabel produktivitas yang tidak dijelaskan oleh jam kerja yang tidak dijelaskan oleh pengaruh pendidikan, umur, pendapatan keluarga, jumlah tanggungan anak dan jam kerja, maka dihitung menggunakan rumus:

$$e_2 = \sqrt{1 - R_2^2}$$

$$e_2 = \sqrt{1 - 0,262} = 0,9022$$

Memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan yaitu koefisien determinasi total hasilnya sebagai berikut:

$$R^2_m = 1 - (Pe_1)^2 (Pe_2)^2$$

$$= 1 - (0,2387)^2 (0,9022)^2$$

$$= 1 - (0,0570) (0,8140)$$

$$= 0,9536$$

Keterangan:

$R^2_m$  : Koefisien determinasi total

$e_1, e_2$  : Nilai kekeliruan taksiran standar

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model sebesar 0,9536 atau dengan kata lain

informasi yang terkandung dalam data sebesar 95,36 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 4,64 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

1) Pengaruh langsung pendidikan terhadap IPM di wilayah non SARBAGITA

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa secara langsung variabel pendidikan ( $X_1$ ) dengan koefisien regresi sebesar 18,241 dan probabilitas  $0,000 < \alpha$  5 persen, sehingga berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM ( $Y_1$ ) di wilayah non SARBAGITA. Hal ini berarti semakin tinggi rata-rata tahun pendidikan yang dienyam oleh masyarakat di wilayah non Provinsi Bali, maka semakin tinggi tingkat IPM di wilayah non SARBAGITA.

Pendidikan merupakan salah satu indikator dari tingginya IPM di suatu wilayah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2013) yang menyatakan bahwa hubungan antara pendidikan dengan kualitas hidup adalah semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi IPM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismiati (2017) yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan IPM. Pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap IPM. Pengeluaran publik untuk layanan budaya dan kesejahteraan (termasuk pendidikan dan redistribusi pendapatan) juga akan meningkat ketika sebuah negara mengalami industrialisasi karena elastisitas pendapatan yang tinggi (Dogan, 2006).

2) Pengaruh langsung PAD terhadap IPM di wilayah non SARBAGITA

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa secara langsung variabel PAD ( $X_2$ ) dengan koefisien regresi sebesar 1,1959 dan probabilitas  $0,000 < \alpha$  5 persen, sehingga berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan variabel PAD

berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM ( $Y_1$ ) di wilayah non SARBAGITA. Hal ini berarti semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh wilayah non Provinsi Bali, maka semakin tinggi tingkat IPM di wilayah non SARBAGITA.

PAD merupakan salah satu indikator meningkatnya IPM yang ada di suatu wilayah. Penelitian yang dilakukan oleh Candra Yunita Sari dan Supadmi (2016) menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap IPM di Provinsi Bali. Hasil penelitian yang sama juga diperoleh oleh Widarwanto, dkk (2014) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap IPM.

### 3) Pengaruh langsung pendidikan terhadap tingkat pengangguran di wilayah non SARBAGITA

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa secara langsung variabel pendidikan ( $X_1$ ) dengan koefisien regresi sebesar  $-6,1013$  dan probabilitas  $0,0477 < \alpha$  5 persen, sehingga berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran ( $Y_2$ ) di wilayah non SARBAGITA. Hal ini berarti semakin tinggi rata-rata tahun pendidikan yang dienyam oleh masyarakat di wilayah non Provinsi Bali, maka diikuti pula dengan berkurangnya tingkat pengangguran di wilayah non SARBAGITA.

Pendidikan yang semakin tinggi, akan berdampak pula terhadap tingkat pengangguran, dimana semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan meningkatkan modal manusianya sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rohmah (2018) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Penelitian dengan hasil yang sama juga dilakukan oleh Amalia (2017) yang menyatakan bahwa

pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Sumatra Utara. Makin baik kualitas pendidikan, maka makin besar pula harapan untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang (Kurniawan, 2016).

4) Pengaruh langsung PAD terhadap tingkat pengangguran di wilayah non SARBAGITA

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa secara langsung variabel PAD ( $X_2$ ) dengan koefisien regresi sebesar  $-0,269663$  dan probabilitas  $0,5274 > \alpha$  5 persen, sehingga berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan variabel PAD tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran ( $Y_2$ ) di wilayah non SARBAGITA. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis dari penelitian ini yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di wilayah non SARBAGITA Provinsi Bali.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Rizal (2021) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Adriani dan Yasa (2015) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat tidak langsung digunakan untuk mengurangi tingkat pengangguran, melainkan pengalokasiannya lebih diarahkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan pendidikan gratis, pengobatan dan tunjangan lainnya agar nantinya tercipta lapangan pekerjaan terdidik. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa PAD di wilayah non SARBAGITA tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.

5) Pengaruh langsung IPM terhadap tingkat pengangguran di wilayah non SARBAGITA

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa secara langsung variabel IPM ( $Y_1$ ) dengan koefisien regresi sebesar 21,428 dan probabilitas  $0,012 < \alpha$  5 persen, sehingga berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran ( $Y_2$ ) di wilayah non SARBAGITA. Hal ini berarti semakin tinggi IPM maka semakin tinggi pula tingkat pengangguran di wilayah non SARBAGITA. Hasil ini tentu bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi IPM akan dapat menekan tingkat pengangguran.

Penelitian serupa dilakukan oleh Hasibuan (2021) yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurcholis (2014) bahwa IPM berpengaruh positif terhadap pengangguran di Jawa Timur. Penelitian yang dilakukan Sasan dan Hasan (2020) juga mengemukakan bahwa IPM manusia berpengaruh positif di Asean pada periode 2001-2017. IPM merupakan indikator yang terdiri dari 3 komposit yaitu pendidikan, kesehatan dan hidup yang layak. Berdasarkan hasil penelitian IPM memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran yang berarti ketika IPM naik maka akan diikuti dengan kenaikan pengangguran. Hal tersebut dikarenakan meskipun IPM Indonesia terus mengalami kenaikan dan menciptakan sumber daya yang berkualitas dan terampil jika tidak dibarengi dengan perluasan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja tetap akan meningkatkan tingkat pengangguran. Semakin tinggi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan mengakibatkan para pencari kerja cenderung memilih-milih pekerjaan karena ingin mendapatkan upah yang lebih tinggi sesuai dengan kualitas pendidikan yang dimilikinya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

- 1) Pendidikan dan PAD berpengaruh positif terhadap IPM di wilayah non SARBAGITA Provinsi Bali.
- 2) Pendidikan berpengaruh negatif, PAD tidak berpengaruh dan IPM berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di wilayah non SARBAGITA Provinsi Bali.
- 3) IPM memediasi pengaruh pendidikan dan PAD terhadap tingkat pengangguran terbuka di wilayah non SARBAGITA Provinsi Bali.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pemaparan simpulan di atas antara lain:

- 1) Pemerintah daerah di wilayah non SARBAGITA harus membuat kebijakan yang dapat meringankan masyarakat dalam mengakses pendidikan untuk mendukung meningkatnya IPM dan mengurangi pengangguran yang disebabkan oleh kurangnya tingkat rata-rata tahun sekolah masyarakat.
- 2) Pemerintah memberi wadah dan ruang bagi Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di masing-masing wilayah untuk meningkatkan PAD yang dapat menunjang perekonomian masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses fasilitas pendidikan yang layak.

- 3) Pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja yang tidak terdidik sehingga masyarakat dapat lebih produktif dan hal ini dapat mengurangi angka pengangguran.
- 4) Masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa pendidikan itu penting dan dengan adanya pendidikan akan mempermudah masyarakat dalam memasuki dunia kerja yang dapat menunjang perekonomian.

### REFRENSI

- Adipuryanti, Ni luh Putu Yuni, dan I Ketut Sudibia. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan PAD Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *PIRAMIDA-Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 11 (1), 20-28.
- Adriani, Ni Luh Gede Cintya, I Nyoman Mahaendra Yasa (2015) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Belanja Tidak Langsung Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol.4, No.11
- Asmita, Fitriawaty dan Dede Ruslan. 2017. Analysis of Factors Affecting the Human Development Index in North Sumatra Province. *IOSR-JBR* 19(10). Hal: 27-36.
- Bendesa, I K. G. 2014. Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berkarakter. *Jurnal Piramida*, 10(1). Hal: 1-7.
- Biswajit, Mandal and Arindam Mandal. (2015). A Note on How and Why Growth and Unemployment Go Hand in Hand in Developing Economies. *International Economic Journal*. Univesity at Albani-SUNY, er29 (4), 1-13. <https://doi.org/10.1080/10168737.2015.1025806>
- Chalid, Nursiah dan Yusbar. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 22 (2), 1-12.
- Chowdhury, Mohammad Shafiur Rahman, and Md. Tanjil Hossain. (2014) Determinants of Unemployment in Bangladesh: A Case Study. *Developing Country Studies*. Jatiya

- Kabi Kazy Nazrul Islam University, 4 (3), 16-20.  
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2402908>
- Dewi, Nyoman Lilya Santika dan I Ketut Sutrisna. (2014). Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 3 (3), 76-123.
- Dogan, Ergun. 2006. Government Expenditure and National Income: Causality Tests for Five South East Asian Countries. *International Business and Economics Research Journal*, 5(10). Hal: 49-58.
- Eita, Joel Hinaunye and Johannes M. Ashipala. (2010). Determinants of Unemployment in Namibia. *International Journal of Business and Management*. Monash University, 5 (10), 92-104.
- Fajrii, Muhammad, Arman Delis, dan Yohanes Vyn Amzar. (2016). Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, 9 (2), 89-176.
- Hasan, Zainal dan Sasana, Hadi. 2020. *Determinants Of Youth Unemployment Rate In Asean*. *International Journal Of Scientific & Technology Research* Vol. 9, Issue 03. 2020.
- Hasibuan, Lailan Syafrina. 2021. Analisis Pengaruh Ipm, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Tess*. Universitas Sumatera Utara
- Hayati, Nu. 2016. Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Skill Terhadap Jumlah Pengangguran (Studi Kasus Warga Muslim Di Desa Damarwulan Keling Jepara). Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Helen, Ayres. 2008. Education And Opportunity As Influences On Career Development: Findings From A Preliminary Study In Eastern Australian Tourism. *Journal of Hospitality*. Program Director, Tourism Programme, University of Canberra, 5(1) : 16-28.
- Hou, Jack., Patrick Paul Walsh, and Jing Zhang. 2014. The Dynamics of Human Development Index. *The Social Science Journal*. Hal: 17.
- Inradewa, I Gusti Agung. 2015. Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 4(8).

- Kemi FA and Dayo BO. (2014). Unemployment And Economic Growth In Nigeria. *Journal of Economics and Sustainable Development*, Department of Economics. Ekiti State University, 5 (4), 1-8.
- Kurniawan, Aditya Barry dan Mochamad Affandi. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan PAD terhadap Jumlah Pengangguran di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmiah*. Universitas Brawijaya, Malang, 2 (2), 1-8.
- Kurniawan, Jarot. 2016. Dilema Pendidikan dan Pendapatan di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1). Hal: 59-67.
- Kurniawan, Septyono dan Eny Sulistyaningrum. (2017). Dampak Serikat Buruh Terhadap Tingkat Upah Buruh Sektor Swasta di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 10 (2), 110-252.
- Latifah, N. & M. Y. Darsyah (2017). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran per Kapita Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seminar Nasional Pendidikan, Sains dan Teknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Lestari, Ni Putu Sri Eka. (2014). Pengaruh PAD, Belanja Modal Dan Angkatan Kerja Terhadap PDRB Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 3 (12), 558-566.
- Mada, Muhammad dan Khusnul Ashar. (2015). Analisis Variabel Yang Mempengaruhi Jumlah Pengangguran Terdidik Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 15 (1), 50-76.
- Marhaeni, A.A.I.N, dan Manuati Dewi. (2004). *Buku Ajar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Michael R. Carter and Christopher B. Barrett. (2006). The economics of poverty traps and persistent poverty: An asset-based approach. *The Journal of development Studies*. University of Wisconsin USA, 42 (2), 178-199.
- Nurcholis, Muhammad. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Juni 2014, Vol. 12, No. 1.
- Ogbeide, Frank Iyekoretin, Hillary Kanwanye, and Sunday Kadiri. (2015). The Determinants of Unemployment and the Question of Inclusive Growth in Nigeria: Do Resource Dependence, Government Expenditure and Financial Development Matter?. *Montenegrin Journal of Economics*. University of Benin Nigeria, 11 (2), 49-64.

- Okoye, A.C. (2017). Entrepreneurship Education: A Panacea For Graduate Unemployment In Nigeria. *Online journal of Arts, Management and Social Sciences*, Department of Sociology. University of Abuja, Abuja, Nigeria, 2 (1), 56-63.
- Ozerkek, Y. (2013). Unemployment and Labor Force: A Panel Cointegration Analysis for European Countries. *Applied Econometrics and International Development*. Faculty of Economics Marmara University, 13 (1), 67-76.
- Pramudjasi , Rangga. T, Juliansyah , Diana Lestari. 2019. Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pendidikan Serta Upah Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Paser. *K I N E R J A* 16 (1) 2019, 69-77.
- Prayuda, Mahanatha Giri dan Made Heny Urmila Dewi. (2015). Pengaruh Inflasi Dan PAD Terhadap Pengangguran Di Provinsi Bali Tahun 1994-2013. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 5 (1), 69-95.
- Purnastuti, L., Miller, P. W., & Salim, R. (2013). Declining rates of return to education: evidence for Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 49(2), 213–236.
- Ratha, Putu Widi Suryawan dan Surya Dewi Rustariyuni. (2018). Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *The Journal Of Economics Development*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 7 (3), 261-284.
- Resosudarmo, B. P., and Abdurohman. (2018). Is Being Stuck with a Five Percent Growth Rate a New Normal for Indonesia ?. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. The Australian National University, 54 (2), 141-164.
- Rizal, Yani, Iskandar , Devra Wati Ritonga. 2021. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Di Provinsi Aceh . *Jurnal Samudra Ekonomika*. Vol 5 No.1 Maret 2021
- Rustariyuni, Surya Dewi, Aswitari, Luh Putu, Ratha, Putu Widi Suryawan dan Nina, Gek Ayu. (2018). Open Unemployment in The Province of Bali. *MIMBAR*. 34 (2), 473-485
- Rustariyuni, Surya Dewi. (2014). Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten /Kota Di Provinsi Bali Periode 2004 - 2012. *PIRAMIDA-Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Udayana, 10 (1), 45-55.
- Santos, M.E., and Pablo Villatoro. (2018). A Multidimensional Poverty Index for Latin America. *Review of Income and Wealth*, Instituto de Investigaciones Económicas y

Sociales del Sur (IIES). Bahía Blanca, Argentina and Comision Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago, Chile, 64 (1), 52-82.

Sarah Xue Dong and Chris Manning. (2017). Labour-Market Developments at a Time of Heightened Uncertainty. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. The Australian National University, 53 (1), 1–25.

Seran, Sirilius. (2017). Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor, 10 (2), 59-71.

Suartha, Nyoman dan I Gusti Wayan Murjana Yasa. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 10 (2), 95-107.

Zahroh, Sofiatuz Zahroh. (2017). Analisis Pengaruh PDRB, Angkatan Kerja, Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 5 (2), 1-8.